

# PENGARUH DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN RISIKO INSTRUMEN KEUANGAN PADA PERBANKAN UMUM INDONESIA

<sup>1</sup>Rahmat Fajar Ramdani

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

E-mail: [rahmatfajar300391@gmail.com](mailto:rahmatfajar300391@gmail.com)<sup>1</sup>

---

## FIDUSIA

*Jurnal Ilmiah Keuangan  
dan Perbankan*

ISSN Cetak : 2621-2439

ISSN Online : 2621-2447

**Kata kunci:** Tata Kelola  
Perusahaan, Dewan  
Komisaris, Komite Audit,  
PSAK 107 dan Pengungkapan  
Risiko Keuangan

## ABSTRAK

Perbankan merupakan sektor perusahaan yang memiliki risiko keuangan atas instrument keuangan yang tinggi sehingga diperlukan pengungkapan informasi risiko yang lengkap dan transparan guna meningkatkan kepercayaan para stakeholder. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji peran keberadaan dewan komisaris dan komite audit terhadap kepatuhan pengungkapan risiko atas instrument keuangan di sektor perbankan umum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 46 perbankan umum non syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan jumlah dewan komisaris dan komite audit sebagai ukuran variabel dewan komisaris dan komite audit, penelitian ini menggunakan index pengungkapan risiko keuangan yang disusun berdasarkan PSAK 107. Untuk menguji hipotesis penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian membuktikan secara empiris keberadaan dewan komisaris dan komite audit dapat mempengaruhi secara signifikan tingkat pengungkapan risiko keuangan pada instrument keuangan pada perbankan umum di Indonesia sehingga dapat disimpulkan peran pengawasan komite audit dan dewan komisaris mampu memperkuat kepatuhan manajemen terhadap ketetapan standar akuntansi menurut PSAK yang berlaku di Indonesia.

Banking is a sector characterized by high financial risk associated with financial instruments. The objective of this study is to examine the role of the board of commissioners and the audit committee in compliance with risk disclosure related to financial instruments in the general banking sector in Indonesia. This research utilizes a sample of 46 non-Islamic commercial banks listed on the Indonesia Stock Exchange from 2021 to 2023. The study employs the number of board of commissioners and audit committee members as measures for these variables, and it utilizes a financial risk disclosure index developed based on PSAK 107. To test the research hypotheses, multiple linear regression analysis is employed. The findings empirically demonstrate that the presence of the board of commissioners and the audit committee significantly influences the level of financial risk disclosure regarding financial instruments in general banking in Indonesia. Therefore, it can be concluded that the oversight role of the audit committee and the board of commissioners strengthens management's compliance with accounting standards as stipulated by the applicable PSAK in Indonesia.

## I. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan sektor keuangan penting dalam industry keuangan yang berfungsi sebagai penyalur modal dan pengelolaan risiko dari pelaku ekonomi yang menjadi kunci dalam perekonomian suatu negara (Rahayu et al., 2024). Perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara keuangan menggunakan berbagai instrument keuangan seperti kredit, obligasi dan derivative untuk mengelola dan mengendalikan risiko kredit, likuiditas dan pasar (Capizzi et al., 2023). Instrument keuangan memiliki risiko terjadinya penurunan nilai yang cukup besar yang diakibatkan beberapa risiko meliputi risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga, perubahan kurs dan risiko perubahan harga (Fatouros et al., 2023). Tindakan pengelolaan ini sangat penting bagi sektor perbankan sebagai salah satu upaya untuk memitigasi segala guncangan perekonomian yang menimpa baik secara mikro dan makro yang berasal dari dalam dan luar negeri (Agénor, 2024). Pentingnya peran instrument keuangan serta tindakan pengelolaan risiko ini menyebabkan perbankan perlu untuk memberikan pengungkapan informasi terutama bagi para pemangku kepentingan.

Di Indonesia terdapat standar praktik pengungkapan informasi mengenai risiko instrumen keuangan diatur pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 107 paragraf 33 sampai 40, yang diungkapkan secara kuantitatif dan secara kualitatif. Adapun pengungkapan risiko instrumen keuangan yang diinstruksikan menurut PSAK 107 yaitu; risiko kredit, risiko likuiditas, Risiko pasar (kurs), risiko pasar (suku bunga), risiko pasar (harga). Pentingnya informasi keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan menyebabkan perlunya transparansi serta penyajian data informasi yang terpacaya dan terukur secara handal sehingga kepercayaan investor menjadi semakin meningkat (Yoro, 2024). Dalam studi oleh Bhullar et al., (2024) dijelaskan bahwa pengungkapan faktor risiko di sektor keuangan dan non-keuangan dalam prospektus IPO secara signifikan mempengaruhi *underpricing* saham. Pengungkapan risiko yang memadai mengurangi ketidakpastian investor, yang mengarah pada peningkatan transparansi dan pengurangan kesenjangan informasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan eksternal. Selain itu, studi lain oleh (Zhong et al., 2024) menemukan bahwa transparansi rantai pasokan, yang mencakup pengungkapan risiko keuangan, secara signifikan mengurangi risiko kejatuhan harga saham, menunjukkan bahwa transparansi dalam laporan keuangan dapat melindungi investor dari potensi kerugian.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku serta transparansi atas pengungkapan risiko diperlukan mekanisme pengawasan dan control yaitu dengan keberadaan mekanisme tata kelola perusahaan. Factor tata kelola perusahaan yang baik, seperti dijelaskan dalam literatur tentang perbankan modern, juga berperan penting dalam memastikan bahwa pengungkapan risiko dilakukan secara transparan dan sesuai standar yang berlaku (Murayr, 2023). Selain itu beberapa penelitian Al Maghzom et al (2016) dimana mempelajari factor yang mempengaruhi pengungkapan secara sukarela risiko keuangan dengan menganalisis pengaruh tata

kelola perusahaan serta karakteristik demografi top manajemen sebagai factor yang mempengaruhi pengungkapan secara sukarela risiko keuangan di sektor perbankan di negara Arab Saudi. Secara empiris penelitiannya membuktikan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan kepemilikan manajerial, komite audit, ukuran dewan direksi serta karakteristik demografi gender merupakan determinan utama perusahaan perbankan di Negara Arab Saudi untuk mengungkapkan informasi risiko keuangan secara sukarela. Dilanjutkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Bufarwa et al. (2020) yang mengeksplorasi faktor pengungkapan risiko keuangan yang membuktikan bahwa mekanisme Tata Kelola perusahaan meliputi pemisahan kepemilikan dan diversifikasi gender dewan eksekutif memiliki effect positif pada pengungkapan risiko keuangan di sektor industrial yang terdaftar di London Stock Exchange

Penelitian penelitian sebelumnya telah mencoba menjelaskan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan terutama keberadaan dewan komisaris dan komite audit merupakan mekanisme yang penting yang mempengaruhi luas dan kepatuhan pengungkapan risiko keuangan namun masih ada keterbatasan dalam penelitian-penelitian tersebut, seperti kurangnya perhatian pada perbedaan geografis yang dapat mempengaruhi pengungkapan risiko keuangan. Perlunya penelitian lebih lanjut yang menggabungkan analisis lintas negara untuk memahami variasi pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan risiko keuangan secara lebih komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mekanisme tata kelola perusahaan khususnya dewan komisaris dan komite audit mempengaruhi luas pengungkapan dengan mencoba melakukan studi empiris pada perusahaan perbankan di Indonesia. Meski banyak perusahaan perbankan di Indonesia yang telah berupaya mengungkapkan risiko keuangan, terdapat perbedaan luas pengungkapan di antara mereka. Terutama peran mekanisme tata kelola perusahaan belum dipahami secara menyeluruh dalam konteks pengungkapan risiko keuangan di sektor perbankan Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan melalui keberadaan dewan komisaris serta komite audit terhadap luas pengungkapan risiko keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Indonesia.

Fokus ini penting karena perbankan adalah sektor vital dalam perekonomian yang sangat bergantung pada pengelolaan dan pengungkapan risiko, sejalan dengan pandangan dalam literatur bahwa instrumen keuangan memegang peran kunci dalam operasi bank dan penilaian risiko. Dengan mengaitkan pentingnya industri perbankan dalam ekonomi serta peran instrumen keuangan dengan pengungkapan risiko, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan baik dari sisi teori maupun praktik untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan risiko keuangan

## **II. KAJIAN PUSTAKA**

## Literatur Review Pengungkapan Risiko Keuangan

Perbankan merupakan perusahaan yang memiliki komposisi aset keuangan yang mendominasi sehingga terdapat risiko – risiko keuangan yang perlu di ungkapkan kepada pihak berkepentingan (Agénor, 2024). Namun berdasarkan pada Agensi teori jansen and meckling (1976) menjelaskan bahwa pihak manajemen memiliki akses lebih terhadap informasi mengenai perusahaan atau hal ini disebut sebagai asimetri informasi. dengan demikian perlu adanya mekanisme regulasi pengungkapan secara *full disclosure* terkait risiko keuangan agar dapat mengurangi asimetri informasi yang dimiliki manajemen.

Hingga saat ini penelitian mengenai pengungkapan risiko keuangan pada instrument keuangan yang telah dilakukan mencakup dua lingkup tema penelitian yaitu; mengenai dampak serta kualitas dari pengungkapan risiko keuangan dan praktik pengungkapan informasi risiko keuangan. Heinle & Smith, (2017) melakukan penelitian yang berfokus pada bagaimana pengungkapan informasi risiko oleh perusahaan mempengaruhi harga saham, biaya modal, dan perilaku perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian terkait arus kas. Hasil penelitian menunjukkan pengungkapan risiko dapat menurunkan biaya modal perusahaan dengan mengurangi premi ketidakpastian serta hasil penelitian juga menunjukkan perusahaan cenderung mengumpulkan dan mengungkapkan lebih banyak informasi risiko ketika risiko arus kas mereka lebih tinggi dari yang diharapkan. (Lobo et al., 2019) menguji dampak kualitas pengungkapan risiko pasar yang diwajibkan oleh U.S. Securities and Exchange Commission melalui Financial Reporting Release No. 48 (FRR No. 48) terhadap efektivitas manajemen risiko dimana hasil penelitiannya membuktikan modifikasi pengungkapan risiko yang lebih tinggi dari yang diharapkan berkorelasi dengan penurunan volatilitas arus kas di masa depan.

Thai & Birt (2019) meneliti relevansi nilai dari pengungkapan risiko terkait instrument keuangan pada aset keuangan di perusahaan sektor pertambangan di Australia. Pengukuran pengungkapan informasi risiko keuangan disusun menggunakan index pengungkapan yang diatur oleh standard AASB 7 mengenai instrument keuangan. Penelitiain menggunakan model ohlson (1995) yang dimodifikasi sebagai model analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan pengungkapan informasi risiko instrumen keuangan di laporan keuangan memiliki nilai relevansi bagi investor di sektor pertambangan di pasar modal, hal ini menunjukkan bahwa investor menggunakan informasi risiko instrumen keuangan di laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan terkait instrument keuangan yang dibuktikan dengan adanya hubungan pengaruh dari tingkat pengungkapan informasi terhadap reaksi pasar saham perusahaan di sektor pertambangan di Australia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa investor banyak memfokuskan pada pengungkapan informasi risiko instrumen keuangan pada risiko likuiditas yang terkandung dalam instrument keuangan. Namun terdapat penelitian yang memiliki hasil yang berbeda yang menunjukkan bahwa informasi risiko instrumen keuangan di laporan keuangan tidak relevan dengan keputusan investor di

pasar modal, hal ini telah dibuktikan melalui penelitian Menezes da Costa Neto et al (2023) di industry keuangan di sektor perbankan negara Brazil.

Saat ini penelitian mengenai praktik pengungkapan risiko keuangan telah dilakukan oleh (Al Maghzom et al., 2016) dimana mempelajari factor yang mempengaruhi pengungkapan secara sukarela risiko keuangan dengan menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan serta karakteristik demografi top manajemen sebagai factor yang mempengaruhi pengungkapan secara sukarela risiko keuangan di sektor perbankan di negara Arab Saudi. Secara empiris penelitiannya membuktikan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan kepemilikan manajerial, komite audit, ukuran dewan direksi serta karakteristik demografi gender merupakan determinan utama perusahaan perbankan di Negara Arab Saudi untuk mengungkapkan informasi risiko keuangan secara sukarela. Dilanjutkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Bufarwa et al., 2020) yang mengeksplorasi faktor pengungkapan risiko keuangan yang membuktikan bahwa mekanisme Tata Kelola perusahaan meliputi pemisahan kepemilikan dan diversifikasi gender dewan eksekutif memiliki effect positif pada pengungkapan risiko keuangan di sektor industrial yang terdaftar di London Stock Exchange. Selain itu pengungkapan sukarela risiko keuangan juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan yaitu biaya modal dan kinerja keuangan yang diteliti oleh Nahar et al (2016) di sektor perbankan Bangladesh.

### ***Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (107)***

Almunawwaroh & Setiawan (2023) menjelaskan praktik pengungkapan risiko keuangan merupakan tindakan mengungkapkan informasi material secara transparan terkait risiko instrumen keuangan yang dihadapi perusahaan atau entitas termasuk juga menjelaskan bagaimana risiko ini mungkin dapat terjadi, dampaknya pada kinerja keuangan perusahaan dimasa depan dan bagaimana langkah langkah mitigasi yang diterapkan oleh perusahaan. Fatouros et al. (2023) mengungkapkan dalam praktik pengungkapan risiko keuangan meliputi beberapa pengungkapan informai mengenai risiko tingkat suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas dimana risiko ini merupakan contoh risiko yang penting dan relevan bagi keputusan para *shareholder*.

Di Indonesia praktik pengungkapan informasi mengenai risiko instrumen keuangan diatur pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 107 paragraf 33 sampai 40, yang diungkapkan secara kuantitatif dan secara kualitatif. Adapun pengungkapan risiko instrumen keuangan yang diinstruksikan menurut PSAK 107 yaitu; risiko kredit, risiko likuiditas, Risiko pasar (kurs), risiko pasar (suku bunga), risiko pasar (harga). Bagi perusahaan perbankan Indonesia mematuhi PSAK 107 merupakan suatu kewajiban atau *mandatory* terutama bagi perusahaan perbankan yang telah *go public*, meskipun pada praktinya luas pengungkapan mungkin akan berbeda beda pada setiap perusahaan perbankan.

### ***Peran Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Dewan Komisaris dan Komite Audit***

Menurut *Organization For Economic Co – operation and Development* (OECD) (1999) Tata Kelola Perusahaan merupakan serangkaian hubungan dewan perusahaan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, selain itu tata Kelola juga merupakan struktur dimana tujuan perusahaan ditetapkan, cara mencapainya serta monitoring kerja. Cadbury (1999) menjelaskan tata Kelola perusahaan merupakan keseimbangan antara tujuan ekonomi sosial, serta tujuan secara individu maupun kelompok yang telah diselearaskan secara bersama. (Mallin, 2019) menjelaskan tata kelola perusahaan sebagai suatu system yang berhubungan dengan pengelolaan dan controlling.

Dewan komisaris merupakan salah satu dari mekanisme tata Kelola perusahaan yang berperan dalam mengawasi jalannya kebijakan yang dibuat oleh Direksi serta mengawasi jalannya operasional perusahaan, memberikan arahan strategis, serta memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. (Keping, 2018). Komite audit merupakan bagian dari tata Kelola perusahaan yang berperan penting dalam pengawasan independent terkait pelaporan keuangan serta penilaian dan pengendalian risiko (Voicu, 2001). Di Indonesia peraturan mengenai jumlah keberadaan dewan komisaris dan komite audit diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55 tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Perbankan Umum, berdasarkan aturan ini pada pasal 23 dijelaskan bahwa perbankan wajib memiliki minimal 3 anggota dewan komisaris lalu berdasarkan pasal 41 dijelaskan bahwa minimal anggota komite audit yang dimiliki perusahaan adalah 3 anggota.

Dalam konteks kepatuhan terhadap regulasi standar akuntansi keuangan keberadaan dewan komisaris dan komite audit sangat berperan penting dalam memastikan penerapan praktik akuntansi telah semestinya, salah satunya adalah pengungkapan risiko keuangan yang diatur oleh ketentuan standar akuntansi yang di gunakan oleh setiap negara. Berdasarkan hasil riset (Al Maghzom et al., 2016; Bufarwa et al., 2020; Murayr, 2023) secara empiris penelitiannya membuktikan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan, komite audit, ukuran dewan komisaris merupakan determinan utama praktik pengungkapan risiko keuangan pada perusahaan perbankan di Negara Arab Saudi dan London

### ***Pengembangan hipotesis***

Perbankan merupakan perusahaan yang memiliki komposisi aset keuangan yang mendominasi sehingga terdapat risiko – risiko keuangan yang perlu di ungkapkan kepada pihak berkepentingan (Agénor, 2024). Agensi teori jansen and meckling (1976) menjelaskan bahwa pihak manajemen memiliki akses lebih terhadap informasi mengenai perusahaan atau hal ini disebut sebagai asimetri informasi. Untuk mengantisipasi dampak asimetri maka diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat melalui tata Kelola perusahaan melalui keberadaan dewan komisaris dan komite audit akan memperkuat pengawasan dan memonitoring perilaku manajerial terutama mengenai kepatuhan penerapan standar akuntansi keuangan oleh manajerial terkait pengungkapan risiko keuangan yang terkandung di instrument keuangan perbankan. Hal

ini diperkuat oleh riset yang dilakukan oleh (Al Maghzom et al., 2016; Bifarwa et al., 2020; Murayr, 2023) menjelaskan tata kelola perusahaan yang baik, melalui peran komite eksekutif, dewan komisaris dan komite audit berperan penting dalam memastikan bahwa pengungkapan risiko dilakukan secara transparan dan sesuai standar yang berlaku. Berdasarkan teori serta konsep serta temuan penelitian selanjutnya maka di susunlah hipotesis

*H<sup>1</sup>: Keberadaan dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pengungkapan risiko instrumen keuangan perbankan*

*H<sup>2</sup>: Keberadaan komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pengungkapan risiko instrumen keuangan perbankan*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### ***Data dan Sampel Penelitian***

Penelitian ini masih menggunakan industry jasa keuangan perbankan. Dipilihnya sektor perbankan karena sektor ini memiliki komposisi aset keuangan terutama instrumen keuangan yang besar di komponen assetnya sehingga rentan mengalami risiko keuangan (Agénor, 2024). Penelitian ini menggunakan 46 perusahaan perbankan umum non syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan data – data keuangan yang diambil atau berasal dari annual report masing – masing perusahaan sampel yang diakses dan diperoleh langsung dari website perusahaan atau IDX Bursa Efek Indonesia dengan pengamatan selama 3 tahun yaitu 2021, 2022, 2023

#### ***Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian***

Penelitian ini menggunakan dua (2) variabel Independen yaitu Dewan Komisaris (Decom) dan Komite Audit (AuditCom). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu (*DSCORE*) pengungkapan risiko instrumen keuangan. Penelitian ini menggunakan dua variabel control yaitu; ukuran perusahaan (Ln Asset) dan struktur modal (Leverage)

#### ***Mengukur Pengungkapan Risiko Keuangan Instrumen Keuangan (DSCORE)***

Penelitian menggunakan indeks skor pengungkapan risiko yang telah dikembangkan sebelumnya oleh Thai & Birt (2019) dan Menezes et al (2023) yang disesuaikan dengan item pengungkapan standar akuntansi Indonesia PSAK 107 mengenai pengungkapan instrument keuangan. Berdasarkan *index disclosure* yang dikembangkan melalui item pengungkapan yang diatur pada PSAK 107 maka terdapat 5 risiko pengungkapan dimana total dari masing – masing risiko pengungkapan sebanyak 26 item yang diungkapkan secara kuantitatif maupun kualitatif. Berdasarkan index pengungkapan yang telah disusun tersebut berikut rumus perhitungan index pengungkapan berdasarkan item pengungkapan yang ada :

$$Dscore = \frac{\text{Jumlah Item yang diungkapkan}}{26 \text{ item}}$$

#### *Pengukuran variabel Dewan Komisaris dan Komite Audit*

Mengacu pada penelitian (Al Maghzom et al., 2016; Bufarwa et al., 2020; Murayr, 2023) dewan komisaris dan komite audit pada penelitian ini diukur berdasarkan jumlah dari dewan komisaris serta komite audit yang bertugas di perusahaan

#### *Pengukuran variabel control ukuran perusahaan dan struktur modal*

Mengacu pada penelitian Hemrit & Belgacem (2024) variabel kontrol ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur melalui Logaritma natural asset (LnAsset). variabel kontrol struktur modal pada penelitian ini mengacu pada Rahman (2024) diukur dengan rasio Leverage

#### **Metode Analisis**

Untuk menganalisis hasil penelitian, digunakan analisis statistika deskriptif rata-rata, nilai maksimum dan minimum untuk mengetahui gambaran atau deskripsi dari kondisi pengungkapan risiko keuangan, jumlah komite audit dan dewan komisaris serta ukuran dan struktur modal pada 46 perusahaan yang dijadikan sampel. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk membuktikan pertanyaan penelitian serta hipotesis dengan data cross section dengan persamaan sebagai berikut:

$$DScore_{it} = \beta_0 + \beta_1 Decom_{it} + \beta_2 AuditCom_{it} + \beta_3 LnAsset_{it} + \beta_4 Leverage_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

- $DScore_{it}$  = index pengungkapan risiko instrument keuangan pada tahun pengamatan  
 $\beta_1 Decom_{it}$  = Jumlah dewan komisaris pada tahun pengamatan  
 $\beta_2 AuditCom_{it}$  = Jumlah komite audit pada tahun pengamatan  
 $\beta_3 LnAsset_{it}$  = jumlah logaritma natural asset pada tahun pengamatan  
 $\beta_4 Leverage_{it}$  = Rasio Leverage pada tahun pengamatan  
 $\varepsilon_{it}$  = Error

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Statistika Deskriptif**

**Tabel 2. Analisis Statistika Deskriptif**

Variabel	Rata – Rata	Min	Max
<i>DSCORE</i>	82	69	97
<i>Dekom (X1)</i>	5 anggota	3 anggota	7 anggota
<i>AuditCom (X2)</i>	4 anggota	3 anggota	5 anggota
<i>Ln Asset (control 1)</i>	5,48	0,45	35,21
<i>Leverage (control 2)</i>	8,4 kali	6,2 kali	12,45 kali
N	138		

Sumber: Data diolah tahun 2024

Berdasarkan hasil pada tabel dua di atas terlihat bahwa *Dscore*) 46 perusahaan *Perbankan umum di Indonesia* selama tahun 2021 hingga 2023 yaitu sebesar 82% dengan Tingkat pengungkapan tertinggi 97 % dan terendah pada Tingkat 69 %. besarnya rata – rata logaritma Asset dari 46 perusahaan *perbankan* selama periode tahun 2021 hingga 2023 yaitu sebesar 5,48 dengan nilai logaritma asset tertinggi 35,21 dan terendah pada Tingkat 0,45. Besarnya rasio leverage 46 perusahaan perbankan Indonesia berkisar pada rata – rata 8,4 kali dengan rasio tertinggi sebesar 12,45 kali dan terendah pada 6,2 kali. Berdasarkan pada nilai komposisi anggota komite audit rata – rata anggota komite audit 46 perbankan konvensional selama tahun 2021 hingga 2023 sebanyak 3,5 atau dibulatkan 4 orang dengan jumlah terbanyak 5 orang dan paling sedikit 3 orang. Demikian juga dengan jumlah dewan komisaris, rata – rata dewan komisaris sebanyak 5,2 atau 5 orang dengan jumlah terbanyak 7 orang dan paling sedikit 3 orang.

### Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

#### Uji Asumsi Klasik Normalitas Data

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas data Jarque- Bera Test**

Test of Normality			
Jarque Bera	Statistic	df	Sig
Residuals	1,034	2	0,596

Sumber: Data diolah tahun 2024

Berdasarkan hasil uji normalitas data melalui Jarque – Bera Test terlihat bahwa nilai p value signifikansi sebesar 0,596 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan atas distribusi data dengan demikian data terdistribusi secara normal

#### Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas Variance Inflation Factor – VIF**

Variabel	VIF
Const	36,72
<i>Ln Asset</i>	1.042
<i>Leverage</i>	1.021
<i>AuditCom</i>	1.052
<i>Dekom</i>	1.031

Sumber : data diolah tahun 2024

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas melalui *Variance Inflation Factor* (VIF) terlihat bahwa nilai VIF yang dihasilkan ketiga variabel tersebut berada di bawah atau lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinieritas atau

## Uji Asumsi Klasik Heterogastisitas

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Breusch-Pagan Test)**

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig
Regression	4,438	3	1,513	1,301	0,178
Residual	43, 544	44	0,988		

Sumber : data diolah tahun 2024

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas melalui *Breusch-Pagan Test* terlihat bahwa nilai p value signifikansi sebesar 0,178 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa varians residual berada dalam kondisi dengan demikian maka tidak ada gejala heteroskedastisitas.

## Uji Autokorelasi

**Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson Test)**

Model	Std. Error	Durbin Watson
1	1,132	2,382

Sumber: Data diolah tahun 2024

Berdasarkan hasil uji autokorelasi melalui *Durbin Watson Test* terlihat bahwa Durbin watson sebesar 2,382 berada di kisaran 1,5 hingga 2,5 atau dekat dengan 2 maka ini menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi yang signifikan dalam residual, maka hasil test ini menunjukkan tidak ada gejala autokorelasi

**Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Uji t**

Variabel	Coefficient ( $\beta$ )	Nilai t	P – Value (Sig)
<i>Dekom (X1)</i>	0,0076	3,987	0,029
<i>AuditCom (X2)</i>	0,4468	8,964	0,000
<i>Ln Asset (control 1)</i>	4,2371	0,838	0,406
<i>Leverage (control 2)</i>	1,8123	7,483	0,000

Dependent Variabel : *DSCORE*

Sumber: Data diolah tahun 2024

Berdasarkan tabel 7 di atas, variabel tata kelola perusahaan jumlah dewan komisaris (*Dekom*) terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel pengungkapan informasi risiko keuangan atas instrument keuangan (*DSCORE*) yang dibuktikan melalui nilai p-value 0,029 lebih kecil dari 0,05 dan juga berdasarkan nilai coefisient menunjukkan pengaruh yang positif sebesar 0,0076. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 (H1) dinyatakan **diterima**. Variabel tata Kelola perusahaan jumlah komite audit (*AuditCom*) terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel pengungkapan informasi risiko keuangan atas instrument keuangan (*DSCORE*) yang dibuktikan melalui nilai p-value 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan juga berdasarkan nilai coefisient menunjukkan pengaruh yang positif sebesar 0,4468. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 (H2) dinyatakan **diterima**.

Hasil pengujian variabel control. Variabel ukuran perusahaan (*LnAsset*) terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel pengungkapan informasi risiko keuangan atas instrument keuangan (*DSCORE*) yang dibuktikan melalui nilai p-value 0,406 lebih besar dari 0,05 meskipun coefficient menunjukan arah yang positive 4,2371. Variabel struktur modal (*Leverage*) terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel pengungkapan informasi risiko keuangan atas instrument keuangan (*DSCORE*) yang dibuktikan melalui nilai p-value 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan juga berdasarkan nilai coefisient menunjukan pengaruh yang positif sebesar 1,8123.

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian melalui statistika deskriptif terlihat bahwa rata – rata pengungkapan risiko keuangan perusahaan perbankan umum di Indonesia masuk dalam kategori skor tinggi dengan rata – rata skor 82, hal ini jika mengacu pada nilai skor pengungkapan yang berkisar 0 sampai 100. Berdasarkan mekanisme tata Kelola perusahaan jumlah minimal dewan komisaris di Indonesia yaitu sebesar 3 anggota, dan rata – rata berjumlah 5 orang melebihi jumlah minimum, hal sama juga pada jumlah komite audit yang rata – ratanya telah melebihi jumlah minimum yaitu 3 anggota hal ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55 tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Perbankan Umum sesuai dengan pasal 23 tentang jumlah komisaris dan pasal 41 tentang jumlah komite audit. Berdasarkan hasil statistika deskriptif dapat dibuat kesimpulan awal bahwa perbankan umum di Indonesia memiliki kepatuhan tata Kelola perusahaan dan pengungkapan risiko keuangan yang telah melebihi standar regulasi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis telah terbukti bahwa mekanisme tata Kelola perusahaan keberadaan dewan komisaris dan komite audit terbukti memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap pengungkapan risiko keuangan pada instrument keuangan perbankan umum di Indonesia. Hasil ini menunjukan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris dan komite audit menyebabkan semakin besarnya Tingkat index pengungkapan risiko berdasarkan standar akuntansi keuangan (PSAK 107) dengan demikian mekanisme tata Kelola melalui keberadaan dewan komisaris dan komite audit, terbukti dapat meningkatkan kepatuhan manajemen perbankan Indonesia dalam mematuhi PSAK 107 untuk mengungkapkan informasi risiko keuangan secara transparan yang dibuktikan dengan tingginya index skor pengungkapan.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi konsep peran dan fungsi dewan komisaris dan komite audit sebagai pengawas dan juga fungsi control perusahaan terutama kepatuhan terhadap regulasi yang melekat. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Al Maghzom et al., (2016) Bufarwa et al. (2020) dan Murayr (2023) menjelaskan tata kelola perusahaan yang baik, melalui peran komite eksekutif, dewan komisaris dan komite audit berperan penting dalam memastikan

bahwa pengungkapan risiko dilakukan secara transparan dan sesuai standar yang berlaku

## V. KESIMPULAN

Secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa keberadaan dewan komisaris dan komite audit dapat memengaruhi secara signifikan Tingkat pengungkapan risiko keuangan pada instrument keuangan pada perbankan umum di Indonesia sehingga dapat disimpulkan peran pengawasan komite audit dan dewan komisaris mampu memperkuat kepatuhan manajemen terhadap ketetapan standar akuntansi menurut PSAK yang berlaku di Indonesia. Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu terkait metodologi pengukuran index pengungkapan risiko keuangan atas instrument keuangan yang mungkin mengandung bias kesalahan, karena pengukuran variabel ini menggunakan konten analisis yang di bentuk dan diukur berdasarkan ketelitian dan subjektifitas peneliti dalam memahami standar acuan dalam hal ini PSAK 107. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih mendalam dampak mekanisme tata Kelola perusahaan komite audit dan dewan komisaris dengan mengeksplorasi karakteristik personal, selain itu penelitian selanjutnya dapat menguji secara empiris pada sektor perusahaan yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agénor, P. R. (2024). Open-economy macroeconomics with financial frictions: A simple model with flexible exchange rates. *Journal of Financial Stability*, 73(July), 101293. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2024.101293>
- Al Maghzom, A., Aly, D., & Hussainey, K. (2016). Corporate governance and risk disclosure: Evidence from Saudi Arabia. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 13(2), 145–166. <https://doi.org/10.1504/IJAAPE.2019.096748>
- Almunawwaroh, M., & Setiawan, D. (2023). Does audit committee characteristics a driver in risk disclosure? *Cogent Business & Management*, 10(1), 2167551. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167551>
- Bhullar, P. S., Grover, K. L., & Tiwari, R. (2024). IPO underpricing: a comparative analysis of risk factor disclosures in the financial and non-financial sectors. *The Bottom Line*, 37(3), 332–350. <https://doi.org/10.1108/BL-04-2023-0123>
- Bufarwa, I. M., Elamer, A. A., Ntim, C. G., & AlHares, A. (2020). Gender diversity, corporate governance and financial risk disclosure in the UK. *International Journal of Law and Management*, 62(6), 521–538. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-10-2018-0245>
- Capizzi, V., Dell'atti, S., & Biase, P. Di. (2023). Editorial Note - Climate Risk and Sustainability: Emerging Impacts and Future Perspectives for Financial Intermediaries. *Journal of Financial Management, Markets and Institutions*, 11(2), 1–12. <https://doi.org/10.1142/S2282717X23010028>

- Fatouros, G., Makridis, G., Kotios, D., Soldatos, J., Filippakis, M., & Kyriazis, D. (2023). DeepVaR: a framework for portfolio risk assessment leveraging probabilistic deep neural networks. *Digital Finance*, 5(1), 29–56. <https://doi.org/10.1007/s42521-022-00050-0>
- Heinle, M. S., & Smith, K. C. (2017). A theory of risk disclosure. *Review of Accounting Studies*, 22(4), 1459–1491. <https://doi.org/10.1007/s11142-017-9414-2>
- Hemrit, W., & Belgacem, I. (2024). What are the key drivers of Fraud reporting in Takaful insurance? Evidence from count data models. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, ahead-of-p(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/JFRA-10-2023-0632>
- Jensen dan Meckling: Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Keping, Y. (2018). Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 11(1), 1–8. <https://doi.org/10.1007/s40647-017-0197-4>
- Lobo, G. J., Siqueira, W. Z., Tam, K., & Zhou, J. (2019). Does SEC FRR No. 48 disclosure communicate risk management effectiveness? *Journal of Accounting and Public Policy*, 38(6), 1–62. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2019.106696>
- Mallin, C. A. (2019). Corporate Governance by Christine A. Mallin. In *Oxford press*.
- Menezes da Costa Neto, A., Oliveira, A. F. de, Silva, A. M. C. da, & Barbosa, A. (2023). Value relevance of financial risk disclosures. *Journal of Capital Markets Studies*, 7(1), 22–37. <https://doi.org/10.1108/JCMS-06-2022-0024>
- Murayr, A. A. (2023). *Impact of Corporate Board Structure and International Financial Reporting Standards on Voluntary Risk Disclosure and Firm Value: The Case of Saudi Arabian Listed Companies*. June.
- Nahar, S., Azim, M., & Anne Jubb, C. (2016). Risk disclosure, cost of capital and bank performance. *International Journal of Accounting & Information Management*, 24(4), 476–494. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-02-2016-0016>
- Peraturan OJK: Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 286. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Rahayu, S., Soetjipto, K. S., Sutarman, S., Arifin, A., & Zen, A. B. (2024). the Effect of Risk Management Implementation on Return on Assets of Indonesian Conventional Commercial Banks After the Covid 19 Pandemic in the Digital Economy Era. *Proceeding of International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities*, 7(1), 1247–1264. <https://doi.org/10.34010/icobest.v7i.636>

- Rahman, M. N. B. A. (2024). Exploring the Experimental Analysis of Deep Learning Based Risk Management and Corporate Governance in Islamic Finance. *2024 International Conference on Science Technology Engineering and Management (ICSTEM)*, 1–7. <https://doi.org/10.1109/ICSTEM61137.2024.10560778>
- Thai, K. H. P., & Birt, J. (2019). Do Risk Disclosures Relating to the Use of Financial Instruments Matter? Evidence from the Australian Metals and Mining Sector. *International Journal of Accounting*, 54(4). <https://doi.org/10.1142/S1094406019500173>
- Voicu, I. (2001). Good Governance and Multilateral Diplomacy. *ABAC Journal*, 21(2). <https://search.proquest.com/scholarly-journals/good-governance-multilateral-diplomacy/docview/2384087346/se-2?accountid=41849>
- Yoro, M. (2024). Impact of Financial Reporting Transparency on Investor Decision-Making. *American Journal of Accounting*, 6(1), 25–36. <https://doi.org/10.47672/ajacc.1785>
- Zhong, Q., Song, Q., & Lee, C. C. (2024). Managing crash risks through supply chain transparency: evidence from China. *Financial Innovation*, 10(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-024-00633-3>